



Pelayanan Cepat Tanggap Administrasi Kependudukan Berbasis Masyarakat Di Desa Keroya

Fahrudin^{1*}, Roza Wildani², Winda Kartika Sari³

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia.

³ Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/ujcs.v2i3.69>

Article Info

Received: September 10th, 2021

Revised: September 17th, 2021

Accepted: September 29th, 2021

Abstrak: Desa Keroya merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Aikmel yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur. Jumlah penduduk Desa Keroya pada tahun 2019 yaitu 3.916 jiwa, dengan 1.381 Kepala Keluarga. Desa Keroya merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Kembang Kerang. Desa keroya dimekarkan tahun 2011 dan diakui secara resmi pada tahun 2012. Dengan adanya pemekaran dapat memicu permasalahan pada bagian administrasi kependudukan. Seperti pelayanan pembuatan KTP, Akta Kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga. Pelaksanaan KKN Tematik yang dilaksanakan selama 45 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan. Hal ini dilakukan dengan menjalankan program utama yaitu Pelayanan Cepat Tanggap Administrasi Kependudukan Berbasis Masyarakat Di Desa Keroya. Program ini diawali dengan kegiatan sosialisasi, pendataan, pengumpulan berkas, pelayanan, dan yang terakhir pendistribusian. Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat mulai memperhatikan pentingnya dokumen Adminduk serta dampak dari tidak memiliki Adminduk.

Keywords: Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Masyarakat Desa Keroya.

Abstract: Keroya Village is one of the villages of Aikmel District, which is included in the area of East Lombok Regency. The population of Keroya Village in 2019 was 3,916 people, with 1,381 families. Keroya Village is a village created by the division of Desa Kembang Kerang. The Keroya village was split in 2011 and was officially recognized in 2012. With the division, it can trigger problems in the population administration section. Such as making KTP services, birth certificates, death certificates, and family cards. The implementation of the Thematic KKN, which was carried out for 45 days, aims to increase public awareness of the importance of the Population Administration document. This is done by carrying out the main program of Community Based Population Administration Rapid Response Services in the Village of Keroya. The program begins with socialization, data collection, file collection, services, and finally, distribution. It is hoped that from this activity, the community will start to pay attention to the importance of the Adminduk document and the impact of not having Adminduk.

Keywords: Services; Population Administration; Keroya Village Community.

Citation: Fahrudin, F., Wildani, R., & Sari, W. (2021). Pelayanan Cepat Tanggap Administrasi Kependudukan Berbasis Masyarakat Di Desa Keroya. *Unram Journal of Community Service*, 2(3), 77-82. doi:<https://doi.org/10.29303/ujcs.v2i3.69>

Pendahuluan

Desa Keroya merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Aikmel yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur. Jumlah penduduk Desa Keroya pada tahun 2019 yaitu 3.916 jiwa, dengan 1.381 Kepala Keluarga. Wilayah Desa Keroya terletak di ujung timur dan selatan kecamatan Aikmel yang membentang dari barat ke timur dengan panjang 4,6 Km dan dari utara ke selatan sepanjang $\pm 1,3$ Km

dengan wilayah mencapai 188 Ha. Dengan sebaran penduduk 402/km². Desa Keroya terdiri dari 3 kekadusan yakni dusun Keroya Daya, dusun Keroya, dan dusun Keroya Lauk. Wilayah Keroya sebelum diterbitkan undang-undang No.6 tahun 2014 disebut dusun adalah cikal bakal desa keroya yang keberadaannya sejak tahun 1960-an yang merupakan desa pemekaran dari desa induk yakni Desa Kembang Kerang.

Email: fahrudin.fkip@unram.ac.id (*Corresponding Author)

Desa Keroya merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Kembang Kerang. Desa keroya dimekarkan tahun 2011 dan diakui secara resmi pada tahun 2012. Potensi unggulan yang dimiliki Desa Keroya yaitu dari bidang pertanian karena desa keroya ini terletak di dataran tinggi yang memudahkan masyarakat dalam proses irigasi pertanian. Desa keroya memiliki 3 kelompok tani, dan kondisi tanah yang subur, sehingga cocok ditanami berbagai komoditi tanaman seperti padi, jagung, bawang merah, dan bawang putih, dan lain-lain.

Dengan adanya pemekaran dapat memicu permasalahan pada bagian administrasi kependudukan. Seperti pelayanan pembuatan KTP, Akta Kelahiran, akta kematian, dan kartu keluarga. Untuk akta kematian, permasalahannya adalah belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk membuat dokumen tersebut dikarenakan mereka berfikir bahwa dokumen tersebut tidak terlalu dibutuhkan masyarakat. Selain itu, ada juga faktor lain yang menghambat pelayanan administrasi kependudukan di desa keroya yaitu adanya biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan persoalan adanya pungli dan petugas mempersulit masyarakat dalam pembuatan dokumen tersebut.

Pelayanan administrasi merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah. Diharapkan dengan pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui peningkatan pelayanan administrasi. Dari sini jelas bahwa pembangunan fasilitas umum di satu sisi seharusnya dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri sehingga secara optimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan (Moenir, 2008).

Secara teoritis aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitan peran penduduk tersebut, kualitas mereka perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Gambaran keadaan penduduk yang terus mengalami peningkatan dapat menjadi potensi pembangunan, sekaligus pula dapat menjadi faktor penghambat pembangunan (Amin, 2009).

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin *administrare* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian Administrasi yang dikemukakan oleh para ahli administrasi, ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial (Ridwan, 2014)

Dalam pengertian yang luas Administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-

tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan (Jimly, 2002).

Masalah Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan, dimana dari sistem Administrasi Kependudukan tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat tinggal penduduk. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain (Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008).

Pengertian di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditatamelalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib. Selain untuk legalitas penduduk kepada pemerintah, dokumen ini juga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Terlebih saat ini, setiap pelayanan publik mempersyaratkan adanya dokumen kependudukan sebagai identitas resmi. Misalnya akta kelahiran akan memudahkan anak untuk mendaftar sekolah, KTP (Kartu Tanda Penduduk) memudahkan masyarakat untuk pembuatan rekening tabungan di bank, dan lain sebagainya.

Berbagai pelayanan administratif, seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikasi tanah, dan perizinan, merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti itu tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara (Dwiyanto, 2010). Oleh karena itu, masalah administrasi kependudukan ini tidak bisa diremehkan, maka pelayanan kepada masyarakat terkait pembuatan dokumen administrasi kependudukan harus sangat diperhatikan.

Pelayanan secara online bisa menjadi salah satu cara untuk dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat dan memudahkan masyarakat terkait

pembuatan dokumen kependudukan. Sesuai dengan program yang ditawarkan pemerintah dan dinas urusan kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) untuk wilayah Lombok Timur yaitu program Bakso (Bikin Administrasi Kependudukan dengan Online) dan SID (Sistem Informasi Desa). Sehingga Desa Keroya dapat mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan melalui online, untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan yang berperan penting dan yang berkewajiban menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Peranan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa interplay kepentingan pribadi bagi setiap individu bisa dijalankan secara bebas dan terbuka (Thoha, 2008).

Dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang penting bagi masyarakat adalah Suket, KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan KIA (Kartu Identitas Anak). Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Kusdarini, 2011).

Akta Kelahiran adalah bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak (bankjim, 2016). Akta Kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang, jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 hari kerja sejak meninggal dunia, kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 hari kerja setelah kematian (wika, 2018).

Metode

Sasaran dari kegiatan pelayanan cepat tanggap administrasi kependudukan berbasis masyarakat di Desa Keroya adalah masyarakat secara luas, bertujuan untuk menuntaskan masalah adminduk di Desa Keroya. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi, pendataan, pengumpulan berkas, pelayanan secara kolektif bersama dukcapil, dan pendistribusian. Kegiatan sosialisasi meliputi kegiatan penjelasan mengenai pentingnya dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Pendataan meliputi kegiatan pengumpulan data masyarakat yang belum mempunyai dokumen administrasi kependudukan. Pengumpulan berkas meliputi kegiatan pengumpulan

berkas persyaratan untuk pembuatan dokumen administrasi kependudukan. Pelayanan secara kolektif meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melengkapi dokumen administrasi kependudukan, dimana pelayanan dilakukan bekerja sama dengan dukcapil. Terakhir pendistribusian meliputi penyaluran hasil dokumen administrasi kependudukan.

Waktu dan Tempat

Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 16 Juli 2019 s/d 27 Agustus 2019. Bertempat di Kantor Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Prosedur Kerja pelayanan cepat tanggap administrasi kependudukan berbasis masyarakat di Desa Keroya

Prosedur kerja dalam kegiatan pelayanan cepat tanggap administrasi kependudukan berbasis masyarakat di Desa Keroya, dimulai dengan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan, berbagai manfaat dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat, sosialisasi ini disampaikan kepada masyarakat secara luas. Kegiatan selanjutnya adalah pendataan, kegiatan ini dilakukan dengan mendata masyarakat yang belum memiliki dokumentasi administrasi kependudukan dalam kegiatan ini dibantu oleh ibu-ibu kader desa Keroya.

Kegiatan selanjutnya pengumpulan berkas dilakukan dengan mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk membuat dokumen administrasi kependudukan dari masyarakat, pengumpulan berkas dilakukan dengan membuka stand di masing-masing rumah kepala dusun. Kegiatan selanjutnya adalah pelayanan secara kolektif bekerja sama dengan Dukcapil.

Pada kegiatan ini mahasiswa KKN bekerjasama dengan Dukcapil melayani masyarakat yang belum sempat mengumpulkan syarat pembuatan dokumen administrasi kependudukan, serta dalam kegiatan ini dilakukan perekaman untuk masyarakat yang belum memiliki KTP, kegiatan ini dilakukan di Kantor Desa Keroya. Kegiatan terakhir yaitu pendistribusian dokumen administrasi kependudukan yang sudah tercetak seperti KK, Suket, Akta kelahiran, dan KIA, pendistribusian dilakukan di Aula Kantor Desa Keroya.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan kepada masyarakat luas secara tidak langsung melalui para kepala dusun dan ibu-ibu kader dengan menjelaskan pentingnya memiliki dokumen administrasi

kependudukan dan bertujuan untuk menjelaskan dokumen apa saja yang terkait dengan administrasi kependudukan, serta apa fungsi dari dokumen-dokumen tersebut bagi masyarakat, serta apa dampak jika masyarakat tidak memiliki atau tidak melengkapi dokumen administrasi kependudukan.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan ke TK/Paud yang ada di Desa Keroya, kegiatan sosialisasi ini menjelaskan fungsi dan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak umur dibawah 16 tahun, kegiatan sosialisasi ini disampaikan kepada ibu-ibu. Kegiatan sosialisasi secara tidak langsung diadakan dari tanggal 17 Juli 2019 s/d 20 Juli 2019, dan kegiatan sosialisasi ke TK dan Paud diadakan pada tanggal 30 Juli 2019.



Gambar 1. Sosialisasi KIA

Pendataan dan Validasi Data Penduduk

Kegiatan pendataan dan validasi data penduduk ini diadakan dari mulai tanggal 17 Juli 2019 s/d 28 Juli 2019. Kegiatan ini dibantu oleh ibu-ibu kader. Pendataan dan validasi data penduduk ini bertujuan untuk mendata jumlah penduduk yang telah memiliki atau yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, serta membantu desa untuk mengetahui data real jumlah penduduk di Desa Keroya.

Dari hasil pendataan jumlah masyarakat yang masih belum melengkapi dokumen administrasi kependudukan sebesar 10% dari 90% penduduk desa Keroya. Hasil pendataan dijadikan sebagai data acuan untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan.



Gambar 2. Pendataan dan validasi data penduduk dengan kepala kades



Gambar 3. Pendataan dan validasi data penduduk dengan ibu kader

Pengumpulan berkas Persyaratan Adminduk

Kegiatan pengumpulan berkas diadakan setelah pendataan masyarakat yang belum memiliki adminduk terdata. Pengumpulan berkas bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan administrasi kependudukan pada saat pelayanan secara kolektif dari dukcapil. Kegiatan pengumpulan berkas persyaratan diadakan sebelum pelayanan kolektif bersama dukcapil. Pengumpulan berkas ini juga dilakukan, untuk mengetahui berkas adminduk apa saja yang tidak dimiliki oleh masyarakat setempat.



Gambar 4. Pengumpulan berkas persyaratan adminduk

Pelayanan Secara Kolektif Bersama Dukcapil

Pelayanan ini diadakan pada tanggal 31 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Keroya, pelayanan dilakukan secara kolektif oleh Dukcapil yang bekerjasama dengan mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram. Kegiatan pelayanan ini bertujuan untuk melayani masyarakat yang ingin membuat dokumen administrasi kependudukan secara langsung dan dilayani oleh pihak dukcapil. Pelayanan secara kolektif memudahkan masyarakat yang ingin membuat dokumen administrasi kependudukan tanpa melalui calo dan tanpa dikenakan biaya.

Pelayanan adminduk secara kolektif diawali dengan menyerahkan berkas-berkas persyaratan yang telah terkumpul sebelumnya kepada dukcapil untuk diproses, dan dilanjutkan dengan pelayanan terhadap masyarakat yang belum menyerahkan berkas persyaratan. Pencetakan serta perekaman dokumen

adminduk dilakukan secara langsung oleh pihak dukcapil di Aula Kantor Desa Keroya, sedangkan untuk penerimaan berkas dilakukan diluar Aula oleh mahasiswa/mahasiswi KKN Tematik Universitas Mataram hal ini bertujuan untuk mensterilkan lokasi pencetakan dan perekaman dokumen adminduk.



Gambar 5. Pelayan pembuatan adminduk oleh pihak dukcapil bekerja sama dengan mahasiswa KKN Tematik



Gambar 6. Penyerahan berkas ADMINDUK dari Ketua KKN Tematik UNRAM kepada pihak Dukcapil.



Gambar 7. Foto bersama dengan petugas Dukcapil

Pendistribusian Berkas Adminduk Yang Telah Tercetak

Pendistribusian dilakukan pada tanggal 26, 27, 28, dan 29 Agustus 2019. Pendistribusian dilakukan setelah semua berkas masyarakat yang telah dikumpulkan tercetak. Pendistribusian dilakukan di

Aula Kantor Desa Keroya. Pendistribusian dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang telah mengumpulkan syarat pembuatan administrasi kependudukan untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan tersebut tanpa harus pergi ke kantor dukcapil.

Kegiatan pendistribusian merupakan kegiatan terakhir dari program pelayanan cepat tanggap administrasi kependudukan berbasis masyarakat di desa Keroya. Dari kegiatan ini kami berharap masyarakat desa Keroya lebih semangat untuk membuat dokumen administrasi kependudukan, karena adminduk merupakan dokumen yang sangat penting, dan harus dimiliki.



Gambar 8. Pendistribusian Adminduk KIA



Gambar 9. Pendistribusian Adminduk KK



Gambar 10. Pendistribusian Adminduk Akta Kelahiran

Kesimpulan

Simpulan dari program Pelayanan Cepat Tanggap Administrasi Kependudukan Berbasis

Masyarakat Di Desa Keroya ini adalah masyarakat mampu meningkatkan perhatiannya terhadap pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan dengan maksimal. Pelayanan ini kami harapkan tetap berlangsung di Desa Keroya agar masyarakat bisa lebih mudah dalam pembuatan dokumen Adminduk. Melalui kegiatan ini pemahaman masyarakat desa Keroya tentang pentingnya dokumen Adminduk serta dampaknya jika tidak memiliki dokumen Adminduk bertambah, melalui kegiatan ini kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang membuat dokumenn Adminduk melalui calo dan tidak ada lagi pungutan liar (pungli).

References

- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan, Kolaboratif*. Gajah Mada Universit Press. Yogyakarta.
- Amin Z. (2009). *Strategi Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Lampung Barat*. IPB. Bogor.
- Bankjim. (2016). *Mamfaat dan Kegunaan Akta Kelahiran*. Retrieved from: <http://www.bankjim.com>.
- Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan. (2008). Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Ridwan, HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly, A. (2002). *Administrasi Kependudukan Indonsia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Kusdarini, E. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. UNY Press. Yogyakarta.
- Moenir, H.A.S. (2008). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Thoha, M. (2005). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wika. (2018). *Akta Kematian*. Retrieved from: <http://www.datawika.com>.